

TESIS

**KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI
KLIEN OLEH STAF NOTARIS**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD KEVIN SARAGI, S.H.

NIM. 2320216310016

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juli 2026

**KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF
NOTARIS**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Dalam
Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum niversitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD KEVIN SARAGI, S.H.

NIM. 2320216310016

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juli 2026

Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal 14 Juli 2026

PEMBIMBING



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2002

Tesis ini telah di pertahankan di depan

Sidang Panitia Penguji

Pada Tanggal 2 juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr.H.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H
Sekretaris	: Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn
Anggota	: Dr.Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kevin Saragi, S.H

NIM : 2320216310016

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Tesis : Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Kebocoran
Data Pribadi Klien Oleh Staf Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Kevin Saragi, S.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

MUHAMMAD KEVIN SARAGI

NIM 2320216310016

MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Tesis :

KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI KLIEN OLEH STAF NOTARIS

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 20%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 21 Juli 2026



Mengetahui,
Maka Dekan Bidang Akademik
Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF NOTARIS

Muhammad Kevin Saragi¹, Rahmida Erliyani²

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 120
Halaman**

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris dibantu oleh staf yang memiliki akses terhadap dokumen dan data pribadi klien. Akses tersebut diperlukan untuk menerima dan memeriksa berkas, menyusun rancangan akta, memasukkan data ke dalam sistem elektronik, mengelola arsip, serta melakukan pendaftaran kepada instansi terkait. Namun, keterlibatan staf juga menimbulkan risiko kebocoran data, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian. Persoalan hukum muncul karena staf merupakan pelaku langsung, sedangkan akses terhadap data diperoleh melalui pekerjaan, penugasan, fasilitas, dan kewenangan yang diberikan oleh notaris.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum notaris atas kebocoran data pribadi klien oleh staf berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, bentuk dan batas pertanggungjawaban tersebut berdasarkan asas *vicarious liability*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara preskriptif untuk menemukan konstruksi pertanggungjawaban yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi notaris maupun klien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan ganda. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta serta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Pertanggungjawaban berdasarkan UUJN pada dasarnya berorientasi pada kesalahan pribadi, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesengajaan, kelalaian, pelanggaran kewajiban jabatan, atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, notaris dapat dikualifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan cara pemrosesan, jenis data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan, serta pihak yang memperoleh akses terhadap data klien. Kedudukan tersebut mengharuskan notaris menerapkan langkah teknis dan operasional untuk menjamin keamanan data, menjaga kerahasiaan, mencegah akses tidak sah, mengawasi staf yang terlibat dalam pemrosesan, serta menunjukkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi. Dengan demikian, kewajiban notaris tidak hanya bersifat pasif dalam bentuk larangan

¹ NIM : 2320216310016

² Pembimbing

membocorkan rahasia jabatan, tetapi juga bersifat aktif melalui penerapan tata kelola dan sistem pengamanan data yang memadai.

Asas *vicarious liability* dapat diterapkan secara terbatas dalam hubungan antara notaris dan staf karena terdapat hubungan kerja, subordinasi, pemberian tugas, akses, serta kewenangan pengawasan. Dasar yang sejalan dengan asas tersebut terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kebocoran dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, menggunakan akses atau fasilitas kantor, serta berkaitan dengan kelalaian pengawasan, kegagalan pembatasan akses, atau tidak diterapkannya standar keamanan data.

Namun, tidak seluruh perbuatan staf secara otomatis menjadi tanggung jawab notaris. Apabila staf menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi, bertindak di luar tugas dan kewenangannya, serta notaris telah menerapkan pengawasan dan pengamanan yang layak, maka tanggung jawab utama berada pada staf sebagai pelaku langsung. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus mempertimbangkan hubungan tindakan staf dengan pekerjaannya, tujuan perbuatan, penggunaan fasilitas kantor, kemampuan notaris melakukan pengawasan, hubungan sebab akibat, dan pemenuhan standar kehati-hatian.

Tesis ini menawarkan model *fault-based proportional liability*, yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian pengawasan, kegagalan tata kelola, dan luasnya kontrol yang dimiliki notaris. Model tersebut menggabungkan prinsip kesalahan, standar *due diligence*, pembatasan tanggung jawab notaris, serta pemisahan tanggung jawab pribadi staf. Dengan konstruksi ini, notaris tidak dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab pengawasan, tetapi juga tidak dibebani tanggung jawab mutlak atas seluruh tindakan staf.

Sebagai upaya pencegahan, kantor notaris perlu menerapkan standar operasional perlindungan data, pembatasan akses berdasarkan tugas, perjanjian kerahasiaan, sistem keamanan elektronik yang andal, pencatatan aktivitas akses, pelatihan staf, evaluasi berkala, dan prosedur penanganan kebocoran data. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara UUJN dan UU PDP serta pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan, kewajiban, dan pertanggungjawaban staf dalam pengelolaan data pribadi di kantor notaris.

KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF NOTARIS

Muhammad Kevin Saragi, Rahmida Erliyani

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 120

Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Pelindungan Data Pribadi, Kebocoran Data Pribadi, *Vicarious Liability*, *Fault-Based Proportional Liability*.

Perkembangan digitalisasi dalam praktik kenotariatan menyebabkan notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mengendalikan data pribadi klien. Permasalahan hukum timbul ketika kebocoran data pribadi dilakukan oleh staf notaris yang memperoleh akses berdasarkan hubungan kerja dan penugasan dari notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum notaris atas kebocoran data pribadi klien oleh staf berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta menganalisis penerapan asas *vicarious liability* dalam hubungan antara notaris dan staf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kedudukan tersebut mewajibkan notaris tidak hanya menjaga kerahasiaan akta dan keterangan klien, tetapi juga menerapkan pengamanan, pembatasan akses, pengawasan staf, serta tata kelola pemrosesan data pribadi yang bertanggung jawab. Asas *vicarious liability* dapat diterapkan secara terbatas apabila kebocoran data dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, menggunakan akses atau fasilitas kantor, serta berhubungan dengan kelalaian pengawasan atau kegagalan pengendalian oleh notaris. Namun, notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab secara otomatis apabila staf bertindak untuk kepentingan pribadi di luar tugasnya dan notaris telah melaksanakan standar kehati-hatian yang semestinya. Penelitian ini menawarkan konstruksi *fault-based proportional liability*, yaitu pembebanan tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan, hubungan sebab akibat, kelalaian pengawasan, dan ruang lingkup kontrol notaris. Konstruksi tersebut memberikan keseimbangan antara pelindungan hak privasi klien, kepastian hukum bagi notaris, dan keadilan dalam pembebanan pertanggungjawaban.

LEGAL CONSTRUCTION OF NOTARY LIABILITY UPON CLIENT'S PERSONAL DATA BREACHES BY NOTARY STAFF

By:

Muhammad Kevin Saragi¹, Rahmida Erliyani²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 120 Pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Personal Data Protection, Personal Data Breach, Vicarious Liability, Fault-Based Proportional Liability

The development of digitalization in notarial practice has positioned notaries not only as public officials authorized to draw up authentic deeds, but also as parties who collect, use, store, and control clients' personal data. Legal issues arise when personal data breaches are committed by notary staff who obtain access based on employment relationship and assignments given by the notary. This research aims to analyze the forms and limitations of a notary's liability for breaches of clients' personal data committed by staff under the Notary Office Act and the Personal Data Protection Act, as well as to examine the application of the principle of vicarious liability in the relationship between notaries and their staff. This study is normative legal research employing statute, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal resources were analyzed using a prescriptive method. The results of the study indicate that a notary holds a dual legal position, namely as a public official under the Notary Office Act and as a Personal Data Controller under the Personal Data Protection Act. This dual position requires notaries not only to maintain the confidentiality of deeds and clients' information, but also to implement security measures, access restrictions, staff supervision, and accountable personal data processing governance. The principle of vicarious liability may be applied on a limited basis if the data breach occurs within the scope of employment, involves the use of office access or facilities, and is related to the notary's negligent supervision or failure to exercise control. However, a notary cannot automatically be held liable when a staff member acts for personal interests outside the scope of assigned duties and the notary has exercised the required standard of care. This research proposes a fault-based proportional liability construction, under which liability is allocated according to the degree of fault, causal relationship, supervisory negligence, and the scope of the notary's control. This construction provides a balance between the protection of clients' privacy rights, legal certainty for the notaries, and justice in the allocation of liability.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div

¹ Student Number : 2320216310016

² Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda saya Ronauli Saragi dan Rachmawaty, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harappanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindunganNya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Istri dan Anak-anak saya , atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga segala hal baik selalu menyertai;
3. Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., Bapak Dr.H.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., dan Bapak Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Kebocoran Data Pribadi Klien oleh Staf Notaris”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr.H.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., sebagai ketua penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berharga demi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berharga demi penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, istri dan anak-anak saya, keluarga, serta seluruh kerabat yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 yang telah menjadi sahabat, tempat berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan dan perlindungan data pribadi.

Banjarmasin, 8 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Kevin Saragi, S.H.
NIM. 2320216310016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PERSEMBAHAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian	14
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	24
E. Tinjauan Pustaka	25
F. Metode Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II. BENTUK DAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	46
A. Kedudukan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	46
B. Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi Menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	54
C. Bentuk dan Batasan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.....	65

BAB III BENTUK DAN BATASAN PERTANGGUNJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KLIEN OLEH STAF MENURUT ASAS <i>VICARIOUS LIABILITY</i>	77
A. Hakikat dan Perkembangan Asas <i>Vicarious Liability</i>	77
B. Penerapan Asas <i>Vicarious Liability</i> dalam Hubungan Notaris dan Staf	87
C. Batas Penerapan Asas <i>Vicarious Liability</i> terhadap Notaris	97
D. Rekonstruksi Ideal Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Kebocoran Data Pribadi Klien oleh Staf	107
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA